

MENGGAGAS ISU KEBUTUHAN LOKAL PEREMPUAN SEBAGAI MATERI KAMPANYE CALON DALAM PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2013

Sofa Marwah ¹

Abstrak

Isu pemajuan perempuan telah bertransformasi menjadi bagian dari program pembangunan, dari tingkat nasional sampai daerah. Di tingkat lokal, penting untuk mendesakkan isu dan permasalahan kaum perempuan sebagai materi kampanye kandidat dalam pemilu bupati dan wakil bupati oleh kelompok-kelompok perempuan. Di samping itu, pengadopsian isu dan permasalahan mengenai kebutuhan perempuan yang sesungguhnya sebagai materi kampanye memungkinkan untuk menarik suara pemilih perempuan. Berkaitan dengan hal itu, tulisan ini telah melakukan pemetaan isu dan permasalahan kaum perempuan sesuai data SIGA, yang sekiranya penting untuk dikemas lebih lanjut menjadi materi kampanye kandidat dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banyumas tahun 2013, sekaligus penting bagi kelompok-kelompok perempuan yang ada untuk mendesakkannya sebagai bahan materi kampanye kandidat.

Kata kunci: Kebutuhan Perempuan, Materi Kampanye, Pemilu Bupati

I. Pendahuluan

Kesetaraan dan keadilan gender telah berkembang menjadi isu dunia dan masuk ke dalam hampir semua aspek pembangunan masyarakat. Apa yang menjadi fokus perjuangan kaum perempuan telah bertransformasi menjadi "*special interest*" dalam analisis pembangunan dan program-program intervensi. Isu-isu strategis bagi kemajuan perempuan bukan lagi merupakan isu pinggiran, tetapi sudah menjadi isu penting yang dibahas di berbagai forum publik sampai tingkat kelembagaan negara.

¹ Staf Pengajar Jurusan Ilmu Politik FISIP Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto.

Dalam penjelasan *Development Alternatives with Women for a New Era* (DAWN), terdapat tiga level perubahan yang dilalui berkaitan dengan transformasi isu perjuangan gender. *Pertama*, level makro yang meliputi pasar (ekonomi global, termasuk institusi keuangan internasional, korporasi transnasional), negara (pemerintahan global, termasuk organisasi pemerintah seperti PBB dan asosiasi regional), serta masyarakat sipil (organisasi non pemerintah internasional dan jaringannya). *Kedua*, level tengah yang meliputi pasar (ekonomi nasional), negara (pemerintahan nasional), dan masyarakat sipil (organisasi nasional, termasuk LSM nasional dan organisasi warga negara), dan *ketiga* pada level mikro yaitu meliputi pasar (pasar lokal, ekonomi berbasis komunitas), negara (pemerintahan lokal, termasuk struktur politik informal berbasis kekerabatan, agama, dan etnik), dan masyarakat sipil (komunitas lokal baik di kota dan desa).²

Selanjutnya tulisan ini mencoba mengeksplorasi upaya pengintegrasian isu pemajuan bagi kaum perempuan melalui transformasi perjuangan dalam level mikro, yaitu pemerintahan maupun komunitas lokal, khususnya dalam pelaksanaan pemilu bupati. Di satu sisi, adalah hal yang penting untuk mendesakkan isu pemajuan di tingkat lokal melalui pemilu bupati oleh kelompok-kelompok tertentu yang memiliki konsen meningkatkan kualitas hidup kaum perempuan. Di sisi lain, isu-isu yang berkaitan langsung dengan kebutuhan perempuan seharusnya mampu menarik tingkat elektabilitas kandidat pada pelaksanaan pemilu bupati. Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyumas tahun 2013 menjadi ruang bagi penulis untuk memetakan isu-isu kebutuhan perempuan di tingkat lokal Banyumas yang seyogyanya dapat diangkat menjadi materi kampanye calon, sekaligus penting bagi kelompok perempuan yang ada di Banyumas untuk mendesakkan isu-isu tersebut untuk diusung sebagai materi kampanye kandidat.³

² Shirin M Rai, *Gender and the Political Economy of Development*, Cambridge : Polity Press, 2002. h. 159-162.

³ Perlu diketahui bahwa pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banyumas tahun 2013 sudah mengacu pada UU No.15 tahun 2011

II. Isu Pemajuan Perempuan belum Menjadi Pilihan sebagai Materi Kampanye Kandidat

Saat ini komitmen negara untuk memajukan kaum perempuan tercermin dalam UU Nomer 25 tahun 2000 tentang ProPenas yang secara eksplisit telah menjelaskan tujuan pembangunan yang harus juga mengarah pada pencapaian kesetaraan dan keadilan gender. Hal ini berarti setiap kebijakan pembangunan harus dikembangkan secara responsif gender melalui strategi pengarusutamaan gender dalam setiap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi seluruh kebijakan dan program pembangunan. Untuk mendukung implementasi di tingkat daerah, telah lahir pula Inpres No. 9 tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional.

Komitmen negara di atas secara jelas menunjukkan bahwa pergerakan isu-isu perempuan yang diperjuangkan oleh kelompok perempuan telah memasuki level negara baik di tingkat nasional maupun lokal, yang melibatkan kekuasaan negara termasuk jajaran birokrasinya dari tingkat nasional sampai daerah. Mekanisme pengarusutamaan gender yang didukung oleh *national machineries*, yaitu seluruh jajaran birokrasi negara, juga menunjukkan adanya aliansi yang dibangun oleh para kelompok perempuan dengan negara untuk bekerja bersama-sama meningkatkan harkat dan martabat kaum perempuan di Indonesia.

Namun demikian, dalam sistem politik yang ada, isu pemajuan perempuan justru belum masuk pada pintu gerbang pertama yang menurut penulis penting dilalui sebagai upaya transformasi untuk memperjuangkan kepentingan kaum perempuan. Pintu gerbang pertama yang dimaksudkan adalah pelaksanaan pemilu bupati dan

sehingga menggunakan istilah pemilu bupati. Sedangkan Pilkada Banyumas tahun 2008 masih menggunakan istilah pilkada, karena mengacu pada UU No.32 tahun 2004, yaitu dalam kerangka besar otonomi daerah. Sebelumnya dengan mengacu pada UU No.22 tahun 2007, istilah pilkada diganti menjadi pemilukada untuk menunjukkan adanya koordinasi KPU secara nasional.

wakil bupati yang menjadi titik awal bagi calon aktor politik untuk menyerap aspirasi atau kepentingan bersama yang kelak menjadi bagian penting untuk memformulasikan kebijakan jika terpilih sebagai pemimpin daerah.

Beberapa catatan berikut menunjukkan bahwa dalam materi kampanye calon dalam pemilu bupati, isu pemajuan perempuan belum menjadi muatan kampanye yang dianggap krusial. Pilkada Kabupaten Banyumas tahun 2008 diikuti oleh empat pasangan calon, yaitu Mardjoko dan Ahmad Husein, Singgih Wiranto dan Laily Manshur, Bambang Priyono dan Tossy A, Aris Wahyudi dan Asroru Maula. Dari keempat pasangan tersebut, hanya pasangan Aris Wahyudi dan Asroru Maula yang secara eksplisit mencantumkan visi khusus perempuan, yaitu program pemberdayaan peranan wanita dan generasi muda.⁴ Namun demikian, pasangan Aris Wahyudi dan Asroru Maula hanya menempati peringkat terbawah dengan perolehan suara 10,9 persen.⁵

Pengintegrasian program pemberdayaan perempuan tampak belum menjadi bagian utama dari keseluruhan visi misi yang diangkat oleh para kandidat dalam pemilu bupati. Dalam hal ini program pemberdayaan perempuan sebagai materi kampanye untuk menarik suara pemilih, masih jauh determinasinya jika dibandingkan dengan materi kampanye lainnya. Bahkan ketika materi kampanye

⁴ *Radar Banyumas*, 6 Februari 2008.

⁵ Berkaitan dengan hal itu, kandidat perempuan sendiri belum tentu mengusung isu pemajuan perempuan. Dalam Pilkada Banyumas 2008, calon wakil bupati Laily Manshur yang berpasangan dengan Singgih Wiranto telah menempatkan diri sebagai “ibu” orang Banyumas dengan mengusung jargon “*rama biyunge wong Banyumas*” (bapak ibu dari orang Banyumas), namun menurut penulis hal ini kurang bersinggungan langsung dengan upaya peningkatan kualitas hidup perempuan, karena *alih-alih* keikutsertaan Laily Manshur sebagai representasi kaum perempuan, materi kampanye yang diusung saja kurang menyentuh persoalan perempuan secara langsung. Selain itu data LSI menunjukkan bahwa meskipun terdapat kandidat perempuan, namun tetap saja tidak mengusung secara khusus isu-isu perempuan, seperti dalam pemilu bupati di Bolaang Mongondow, Minahasa Selatan, Ambon dan Cianjur. (“Perempuan dan Pilkada”, *Kajian Bulanan Edisi 1 Mei 2007*, Lingkaran Survei Indonesia, Jakarta, hal. 12-13).

calon sudah secara eksplisit mengintegrasikan isu pemajuan perempuan sekalipun. Isu mengenai upaya pengentasan kemiskinan, penyediaan lapangan kerja, dan sebagainya tampak jauh lebih dominan.

Meskipun sudah memasukkan secara jelas mengenai program pemberdayaan wanita dan generasi muda pada kampanye Pilkada Kabupaten Banyumas tahun 2008, namun penekanan kampanye Aris Wahyudi dan Asroru Maula lebih pada program pendidikan gratis, pengurusan kartu tanda penduduk gratis, akte kelahiran gratis, serta pengobatan gratis bagi warga masyarakat miskin. Hal di atas tentu menjadi ironis mengingat jumlah penduduk perempuan di Kabupaten Banyumas saat itu adalah 791.939 jiwa dan penduduk laki-laki 790.680 jiwa.⁶

Secara prinsip seperti halnya kemiskinan dan lapangan kerja juga melibatkan kepentingan perempuan, namun yang dimaksudkan tulisan ini adalah bagaimana materi kampanye itu menekankan bahwa isu-isu utama yang diangkat, ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kaum perempuan secara spesifik, mengingat jumlah kaum perempuan yang berimbang dengan laki-laki dan sebagian besar mereka masih dalam posisi yang cenderung marjinal.

Meskipun tidak secara langsung berkaitan, setidaknya kajian teoritis dari Austin Ranney yang menyatakan bahwa tidak ada korelasi yang signifikan antara jenis kelamin dengan pilihan politik para pemilih dapat menjelaskan permasalahan di atas.⁷ Artinya meskipun jumlah penduduk di Kabupaten Banyumas saat itu hampir berimbang dengan jumlah penduduk laki-laki, namun tidak berarti mereka memberikan pilihan politiknya sesuai kebutuhan mereka sebagai kaum perempuan. Tidak berarti mereka sebagai kaum perempuan akan memberikan suaranya pada kandidat yang mengakomodasi kepentingan perempuan. Dengan kata lain tidak ada

⁶ *Kabupaten Banyumas dalam Angka Tahun 2009*, Purwokerto : Badan Pusat Statistik, 2009.

⁷ Austin Ranney, *Governing : An Introduction to Political Science*, New Jersey : Prentice Hall, 1999, hal. 191.

pengaruh yang signifikan antara jenis kelamin (dalam hal ini perempuan) dengan pilihan politik seseorang.

Selain itu, pandangan secara umum mungkin akan beranggapan bahwa isu pemajuan perempuan belum menjadi permasalahan yang paling penting untuk ditangani dan diselesaikan. Isu kemiskinan dan sejenisnya jauh dianggap lebih krusial menjadi persoalan yang harus diselesaikan sehingga paling banyak dipilih sebagai materi kampanye. Isu perempuan juga masih dianggap kurang bisa menarik perhatian pemilih dan oleh karenanya kurang diangkat menjadi pesan politik para kandidat dalam pemilu bupati dan wakil bupati.

Namun dalam konteks ini penulis mencoba memberikan alternatif pemikiran bahwasanya kegagalan materi kampanye mengenai isu pemajuan perempuan untuk menarik suara pemilih (khususnya kaum perempuan) lebih disebabkan materi yang diusung oleh kandidat kurang secara langsung berkaitan dengan kebutuhan lokal kaum perempuan setempat. Dalam hal ini pemetaan isu perempuan yang seharusnya diangkat oleh kandidat dalam kampanye, sangat penting untuk dilakukan, sehingga materi mengenai isu pemajuan perempuan berkaitan dengan langsung dengan kebutuhan masyarakat (perempuan) di aras bawah.

Dengan kata lain, untuk menarik suara para pemilih perempuan, perlu untuk mengangkat isu-isu pemenuhan kebutuhan mereka secara lebih spesifik. Harus diingat bahwa dengan mengacu pada data *Kabupaten Banyumas dalam Angka Tahun 2010*, jumlah penduduk perempuan di Kabupaten Banyumas hampir berimbang dengan laki-laki, yaitu perempuan sebanyak 776.334 jiwa dan laki-laki adalah 777.568 jiwa.⁸ Untuk itu selanjutnya tulisan ini akan memetakan isu dan permasalahan secara lokal yang dihadapi kaum perempuan di Kabupaten Banyumas yang sekiranya penting untuk diangkat sebagai materi kampanye oleh kandidat dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati tahun 2013.

⁸ *Kabupaten Banyumas dalam Angka Tahun 2010*, Purwokerto : Badan Pusat Statistik, 2010, hal. 70.

III. Pentingnya Mendesakkan Isu Kebutuhan Lokal Perempuan di Kabupaten Banyumas sebagai Materi Kampanye Kandidat

Kaum perempuan mempunyai hak sama sebagai warga negara untuk berpartisipasi dan memperjuangkan kepentingan mereka. Azza Karam menyatakan bahwa kaum perempuan harus dimasukkan ke dalam proses pengambilan keputusan. Dengan kata lain, demokrasi harus mencantumkan opini dan persepsi perempuan sebagaimana laki-laki. Lebih dari itu, jumlah perempuan merupakan sebagian populasi manusia di dunia maupun populasi nasional. Perempuan bukanlah kelompok minoritas dan tidak seharusnya pula dipertimbangkan menjadi minoritas.⁹

Secara teoritis seperti halnya penjelasan dari Sylvia Walby bahwa harapan untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan untuk mendapatkan hak-hak sosial dan politik yang sama antara perempuan dan laki-laki, kunci perubahannya adalah pada perjuangan gerakan feminisme.¹⁰ Setidaknya saat ini di Kabupaten Banyumas sudah memiliki entitas kelompok-kelompok terbentuk dari bawah dan semakin berkembang untuk memperjuangkan kepentingan perempuan. Sebut saja misalnya WCC Lentera Perempuan, Biyung Emban, GOW ataupun ormas sosial keagamaan seperti Muslimat, Fatayat, Aisyiah, maupun yang hadir karena ada campur tangan negara seperti pusat studi gender di berbagai universitas yaitu Unsoed, UMP, STAIN dan Unwiku.

Berkaitan dengan pemetaan isu dan permasalahan lokal kaum perempuan di Banyumas, sebagian besar kajian ini mengacu pada data *Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA) Kabupaten Banyumas Tahun 2010*, yang mengeksplorasi isu kebutuhan perempuan di Kabupaten Banyumas dengan membagi dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan ketenagakerjaan, sektor publik dan

⁹ Azza Karam, "Introduction: Gender and Democracy – Why?", dalam *Women in Parliament: Beyond Numbers*, Stockholm: IDEA, 1998, hal.8.

¹⁰ Dalam Jane Philcher & Imelda Whelehan, *50 Key Concepts in Gender Studies*, London : Sage Publication, 2004, hal. 95.

pengambilan keputusan, kesejahteraan sosial dan perlindungan anak, serta kekerasan berbasis gender dan anak.¹¹

Pertama, bidang pendidikan. Data SIGA menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan, proporsi perempuan sebagai peserta didik semakin rendah. Pada tingkat SMP, jumlah siswa laki-laki di Kabupaten Banyumas adalah 49,7 persen, sedangkan siswa perempuan 50,3 persen. Sedangkan pada tingkat SMA, siswa laki-laki 52,84 persen dan siswa perempuan 47,16 persen. Untuk tingkat SMK, jumlah siswa laki-laki 59,87 persen dan siswa perempuan 40,13 persen. Dengan demikian isu pendidikan menengah atas yang masih belum bisa diakses secara sama oleh siswa perempuan perlu mendapatkan perhatian pemerintah sehingga penting untuk digagas sebagai isu kampanye kandidat.

Selain itu angka putus sekolah di Kabupaten Banyumas masih tinggi. Di tingkat SD, terdapat 226 siswa putus sekolah; di jenjang SMP, ada 394 siswa; pada jenjang SMA terdapat 71 siswa. Jumlah terbesar ada di jenjang pendidikan SMK, yakni sebanyak 422 siswa. Meskipun proporsi siswa putus sekolah lebih tinggi adalah laki-laki, namun cukup tingginya angka putus sekolah siswa perempuan perlu mendapatkan perhatian serius. Demikian pula dengan masih banyaknya penduduk perempuan yang masih buta huruf, di mana 74,40 persen dari 9494 warga peserta belajar di Program Keaksaraan Fungsional adalah perempuan. Padahal belum semua kecamatan memiliki Program Keaksaraan Fungsional seperti Kebasen, Somagede, Purwokerto Timur dan Purwokerto Utara.¹²

Kedua, bidang kesehatan. Pada bidang kesehatan ini, data SIGA menunjukkan bahwa angka kematian ibu sebanyak 41 kasus atau 143,22/100.000 kh. Angka tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Banyumas belum berhasil memenuhi target MDGs tahun 2015, yaitu sebesar 124 per 100.000 kelahiran hidup. Selain itu dalam bidang kesehatan masih menunjukkan persoalan berkaitan dengan gizi buruk. Balita yang mengalami gizi kurang sebanyak 6717 jiwa dan

¹¹*Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA) Kabupaten Banyumas Tahun 2010*, Purwokerto : Bapermas-PPKB dan PPGAPM, 2010.

¹² *Ibid*, hal. 19- 46.

gizi buruk sebanyak 86 kasus. Tingginya kasus gizi kurang dan buruk pada anak merupakan refleksi tingginya kasus status gizi buruk perempuan hamil. Kabupaten Banyumas juga dihadapkan pada permasalahan kesehatan reproduksi yaitu kasus HIV/AIDS. Pada kurun waktu tahun 2006 – 2010, jumlah penderita HIV di Kabupaten Banyumas sebesar 169 orang, terdiri dari 97 laki-laki dan 72 perempuan. Sedangkan jumlah penderita AIDS pada kurun waktu tahun 2006 – 2010, sebesar 73 orang yang terdiri dari 52 laki-laki dan 21 perempuan, dan jumlah penderita AIDS yang meninggal sebesar 35 orang.¹³

Ketiga, ekonomi dan ketenagakerjaan. Jumlah angkatan kerja perempuan di Kabupaten Banyumas saat ini cukup tinggi yaitu 458.003 orang. Desakan kebutuhan ekonomi menjadi penyebab utama keikutsertaan perempuan untuk mencari nafkah. Sedangkan perempuan yang menganggur mencapai 58.295 orang.¹⁴ Berkaitan dengan hal itu, saat ini cukup banyak perempuan yang menjadi buruh migran. Bahkan Kabupaten Banyumas menjadi salah kantong buruh migran di Jawa Tengah. Pada tahun 2009, jumlah buruh perempuan adalah 2109 orang, pada tahun 2010 sebanyak 1467 orang, dan tahun 2011 (sampai Mei) sejumlah 883 orang. Data tersebut hanya data buruh migran yang tercatat resmi di Dinsosnakertrans.¹⁵ Dalam hal ini SIGA menekankan pentingnya penyadaran dan pemberdayaan bagi calon buruh migran sebagai upaya pencegahan berbagai tindak kekerasan. Selain itu diperlukan perluasan lapangan kerja karena banyaknya buruh migran mengindikasikan pertumbuhan angkatan kerja di Kabupaten Banyumas tidak seimbang dengan penciptaan lapangan kerja.¹⁶

Keempat, sektor publik dan pengambilan keputusan. Terkait dengan sektor publik dan pengambilan keputusan, data SIGA menekankan bahwa saat ini keterwakilan perempuan dalam bidang

¹³ *Ibid*, hal. 47- 65.

¹⁴ *Ibid*, hal. 70-74.

¹⁵ W Handoko, Riris A, Sofa M, *Pembentukan Model Perlindungan Anak Buruh Migran di Kabupaten Banyumas*, Laporan Penelitian Hibah Bersaing, Jakarta : Dikti, 2011, hal. 3-4.

¹⁶ *Sistem Informasi Gender dan Anak ..op.cit*, hal. 78.

tersebut masih rendah. Rendahnya keterwakilan perempuan dilihat dari sedikitnya perempuan yang menjadi anggota DPRD Kabupaten Banyumas, sedikitnya perempuan yang menduduki jabatan strategis di partai politik di lingkungan Kabupaten Banyumas, serta sedikitnya PNS perempuan yang menduduki jabatan struktural (Eselon IV-Eselon II) di lingkungan pemerintahan Kabupaten Banyumas.¹⁷

Meskipun tuntutan kebijakan afirmasi relatif dapat dipenuhi oleh partai pada Pemilu 2009 di Kabupaten Banyumas, namun hal itu tidak menjamin terpilihnya caleg perempuan. Jumlah perempuan yang terpilih sebagai anggota DPRD sebanyak 8 orang dari jumlah 50 orang. PDIP mempunyai 3 wakil perempuan, Partai Golkar memiliki 2 wakil perempuan, dan Partai Demokrat, PKB serta PAN masing-masing 1 wakil perempuan.¹⁸ Jumlah perempuan yang menduduki jabatan strategis di partai juga sedikit. Khususnya bagi partai yang memiliki kursi di dewan, dari ketua, sekretaris maupun bendahara didominasi laki-laki. Hanya PDIP dan Partai Golkar yang memiliki sekretaris perempuan.¹⁹ Sedangkan pada jabatan struktural di lingkungan pemerintahan Kabupaten Banyumas, pada Eselon IIa adalah 1 orang laki-laki, Eselon IIb sebanyak 27 orang (24 laki-laki dan 3 perempuan); Eselon IIIa sebanyak 42 orang (36 laki-laki dan 6 perempuan); Eselon IIIb sebanyak 79 orang (68 laki-laki dan 11 perempuan); Eselon IVa sebanyak 383 orang (268 laki-laki dan 115 perempuan); Eselon IVb sebanyak 54 orang (36 laki-laki dan 18 perempuan).²⁰

Kelima, kesejahteraan sosial dan perlindungan anak. Dalam bidang kesejahteraan sosial dan perlindungan anak ini, SIGA menekankan bahwa di Kabupaten Banyumas masih banyak anak penyandang masalah kesejahteraan sosial seperti balita terlantar, anak jalanan, anak nakal dan anak korban kekerasan.²¹ Dari data

¹⁷ *Ibid*, hal. 87-97.

¹⁸ *Data Partai Peserta Pemilu 2009*, Purwokerto : KPU Kabupaten Banyumas, 2009.

¹⁹ *Rekapitulasi Hasil Pemilu Legislatif 2009 Kabupaten Banyumas*, Purwokerto : KPU Kabupaten Banyumas, 2009.

²⁰ *Sistem Informasi Gender dan Anak ..op.cit*, hal. 97.

²¹ *Ibid*, hal. 105-106.

Dinsosnakertrans diketahui ada 844 anak balita terlantar pada tahun 2009, dan tahun 2010 ada 566 anak balita terlantar. Jumlah anak jalanan tahun 2009 adalah 1702 dan tahun 2010 terdapat 1512 anak jalanan. Untuk anak nakal, tahun 2009 ada 315 dan tahun 2010 sebanyak 373 anak nakal. Sedangkan anak korban kekerasan, pada tahun 2009 ada 20 dan tahun 2010 sebanyak 5 anak.²²

Keenam, kekerasan berbasis gender dan anak. Terkait dengan kekerasan berbasis gender dan anak ini, SIGA menekankan masih banyaknya kekerasan yang terjadi terhadap perempuan dan anak. Kekerasan dapat menimpa perempuan siapa saja, dan dilakukan oleh siapa saja, dan dapat terjadi di mana saja, baik di rumah maupun tempat umum.²³ PPT-PPK- KBGA mencatat bahwa pada tahun 2009 kekerasan yang terjadi paling banyak adalah KDRT (56), tahun 2010 paling banyak terjadi pencabulan dan penganiayaan terhadap anak (38 kasus), dan tahun 2011 paling banyak terjadi adalah KDRT (11). Tampak bahwa kasus kekerasan yang terjadi di rumah tangga paling dominan dari tahun ke tahun.²⁴

Penulis percaya bahwa keterwakilan kepentingan perempuan dapat didesakkan melalui berbagai cara, tergantung pada pemikiran dan kreasi yang sekiranya selaras dengan kebutuhan lokal. Secara teoritis Iris Marion Young menjelaskan pentingnya membentuk representasi khusus bagi kelompok yang tertekan, termasuk kaum perempuan. Sedangkan model representasi yang dibutuhkan oleh kaum perempuan tidak ada model khusus yang baku tetapi tergantung pada pemikiran yang kreatif dan fleksibel.²⁵

Dengan demikian pemetaan isu dan permasalahan di atas dapat menjadi bahan kajian bagi kelompok-kelompok perempuan

²² W Handoko, Riris A, Sofa M, *Pembentukan Model Perlindungan...op.cit*, hal. 53.

²³ *Sistem Informasi Gender dan Anak ..op.cit*, hal. 115-122.

²⁴ W Handoko, Riris A, Sofa M, *Pembentukan Model Perlindungan...op.cit*, hal. 54-55.

²⁵ Iris Marion Young, "From Justice and The Politics of Difference", dalam Philip Green (ed.), *Key Concepts in Critical Theory Democracy*, New Jersey : Humanities Press, 1993, hal. 315.

yang ada di Kabupaten Banyumas untuk secara bersama-sama mengupayakan isu dan permasalahan perempuan sebagai materi kampanye kandidat dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banyumas tahun 2013 mendatang. Hal ini merupakan aplikasi nyata dari pemikiran Iris Marion Young bahwa keterwakilan kepentingan perempuan dapat dilakukan melalui berbagai mekanisme dan pemikiran yang kreatif dan fleksibel.

IV. Kesimpulan

Penyelenggaraan pemilu bupati dan wakil bupati merupakan pintu pertama awal bagi upaya mengintegrasikan kebutuhan kaum perempuan melalui materi kampanye kandidat. Di satu sisi, kandidat dapat menggunakan isu dan permasalahan lokal yang dihadapi perempuan untuk menarik perolehan suara pemilih. Di sisi lain, kelompok-kelompok perempuan memperoleh ruang dan waktu untuk mengupayakan masuknya isu kebutuhan kaum perempuan agar nantinya diakomodasi dalam kebijakan jika kandidat terpilih.

Pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyumas tahun 2013, sesuai dengan data SIGA Kabupaten Banyumas tahun 2010, terdapat enam bidang utama yang perlu diperhatikan untuk menarik suara kaum perempuan yang jumlahnya hampir berimbang dengan laki-laki. Di bidang pendidikan, yaitu akses pendidikan menengah atas yang masih kurang bagi perempuan, cukup tingginya angka putus sekolah, dan masih banyaknya perempuan yang buta huruf. Di bidang kesehatan, yaitu cukup tingginya angka kematian ibu, masih banyaknya kasus gizi buruk serta cukup tingginya penderita HIV/AIDS. Sedangkan di sektor publik dan pengambilan keputusan, yaitu rendahnya keterwakilan politik perempuan di lembaga legislatif maupun kepengurusan partai politik, dan sedikitnya perempuan yang menduduki jabatan eselon tinggi di lingkungan pemerintahan kabupaten. Di bidang ekonomi dan ketenagakerjaan, ketersediaan lapangan kerja tidak seimbang dengan angkatan kerja perempuan sehingga cukup banyak yang menganggur dan menjadi buruh migran. Di bidang kesejahteraan sosial dan perlindungan anak, saat ini masih cukup banyak kasus

anak terlantar ataupun anak jalanan. Selain itu masih banyak kasus kekerasan terhadap kaum perempuan dan anak, baik yang terjadi dalam ruang domestik maupun publik.

Demikianlah, tulisan ini mencoba mengeksplorasi isu dan permasalahan kaum perempuan di Kabupaten Banyumas yang sekiranya penting untuk dikemas lebih lanjut sebagai materi kampanye kandidat. Selain itu peran serta kelompok-kelompok perempuan untuk mendesakkan isu dan permasalahan tersebut sebagai bahan materi kampanye kandidat juga sangat penting.

DAFTAR PUSTAKA

- Data Partai Peserta Pemilu 2009*, 2009. Purwokerto : KPU Kabupaten Banyumas.
- Handoko W, A Riris, M Sofa , 2011. *Pembentukan Model Perlindungan Anak Buruh Migran di Kabupaten Banyumas*, Laporan Penelitian Hibah Bersaing, Jakarta : Dikti.
- Marion Young, Iris, 1993. "From Justice and The Politics of Difference", dalam Philip Green (ed.), *Key Concepts in Critical Theory Democracy*, New Jersey : Humanities Press.
- M Rai, Shirin, 2002. *Gender and the Political Economy of Development*, Cambridge : Polity Press.
- Kabupaten Banyumas dalam Angka Tahun 2009*, 2009. Purwokerto : Pemerintah Kabupaten Banyumas.
- Kabupaten Banyumas dalam Angka Tahun 2010*, 2010. Purwokerto : Pemerintah Kabupaten Banyumas.
- Karam, Azza, 1998. "Introduction: Gender and Democracy - Why?", dalam *Women in Parliament: Beyond Numbers*, Stockholm: IDEA.
- "Perempuan dan Pilkada", *Kajian Bulanan Edisi 1 Mei 2007*, Lingkaran Survei Indonesia, Jakarta.
- Philcher, Jane, Whelehan, Imelda, 2004. *50 Key Concepts in Gender Studies*, London : Sage Publication.

Ranney, Austin, 1999. *Governing : An Introduction to Political Science*, New Jersey : Prentice Hall.

Rekapitulasi Hasil Pemilu Legislatif 2009 Kabupaten Banyumas, 2009. Purwokerto : KPU Kabupaten Banyumas.

Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA) Kabupaten Banyumas Tahun 2010, 2010. Purwokerto : Bapermas-PPKB dan PPGAPM.